

ABSTRAK

NURUL NURHANDJATI

14/373289/SSP/307

POLITICAL SETTLEMENTS (PEMUFAKATAN POLITIK)

**DI ANTARA KESULTANAN DAN INSTITUSI PENGAMBIL KEPUTUSAN
DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN DI DIY**

viii+168 halaman

Disertasi ini mengkaji upaya institusi tradisional mempertahankan kekuasaannya di tengah arus modernisasi. Pada proses transformasi tersebut, institusi tradisional sering kali tidak dapat mempertahankan kekuasaannya ketika berhadapan dengan institusi modern. Dengan mengambil kasus Kesultanan Yogyakarta maka pertanyaan yang diangkat adalah bagaimana Kesultanan Yogyakarta sebagai institusi pengambil keputusan tradisional melakukan pemufakatan politik untuk mempertahankan keberadaannya? Dengan menggunakan teori *political settlements*, penulis menjelaskan bagaimana Kesultanan melakukan pemufakatan politik dengan institusi pengambilan keputusan modern mengenai kebijakan pertanahan di DIY. Studi ini memiliki argumen bahwa untuk mempertahankan eksistensi dan otoritas dalam sistem politik modern, institusi tradisional harus melakukan proses negosiasi terus menerus hingga tercapai pemufakatan politik dengan institusi modern yang memiliki sumber legitimasi berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan sejarah untuk mendapatkan penjelasan mengenai upaya-upaya Kesultanan untuk menghadapi institusi modern disekilingnya sejak tahun 1775-2012. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, dalam kerangka untuk mempertahankan kekuasaannya Kesultanan sebagai institusi pengambil keputusan tradisional melakukan negosiasi dan menghasilkan *political settlements* dengan berbagai lembaga pengambilan keputusan lain yang relatif lebih modern dan kuat darinya. *Kedua*, *political settlements* ini walaupun merupakan hasil dari negosiasi yang panjang dari rezim ke rezim, memperbaruinya dari waktu ke waktu serta pelaksanaannya menghindari konfrontasi secara terbuka, terbukti efektif untuk mempertahankan kekuasaan Kesultanan atas tanah. *Ketiga*, institusi pengambil keputusan yang berbeda sifatnya, tradisional dan modern, dapat hidup berdampingan dengan melakukan *political settlements* di dalam satu negara bahkan ketika berbeda level otoritasnya. Institusi tradisional dan modern tidak selalu harus dikotomis atau antagonis dalam sebuah negara modern bila telah melakukan *political settlements* di antara kedua pihak. *Empat*, daya tahan *political settlements* ditopang oleh kesatuan dari masing-masing pihak. Ketika salah satu atau keduanya muncul bukan sebagai sebuah institusi tunggal maka *political settlements* yang dihasilkan tidak akan mampu bertahan lama. Dengan demikian Undang-undang Keistimewaan DIY No. 13 tahun 2012 merupakan *political settlements* terpenting sejak Yogyakarta berdiri, yang menguatkan legitimasi sekaligus mengembalikan kewenangan Kesultanan atas tanah dan politik di wilayahnya.

Studi mengenai *political settlements* dengan Kesultanan Yogyakarta sebagai studi kasus ini mengkonfirmasi penggunaan *political settlements* bisa keluar dari tradisi klasikalnya yang ditandai dengan analisis mengenai *post conflict society*

yang bersifat nasional. Kesultanan Yogyakarta mampu melakukan *political settlements* bukan semata-mata dengan politik nasional tetapi sekaligus dengan institusi pesaing baru yang mempunyai kewenangan pengambil keputusan di tingkat daerah. Studi kasus ini bisa membuktikan *political settlements* bisa digunakan pada ranah non konflik, pada tingkat lokal, atau berlapis tingkat lokal-nasional yang berulang dari rezim ke rezim. Melalui studi ini dapat dijelaskan bahwa *political settlements* bukan logika menang kalah, namun lebih kepada pemufakatan untuk kelanggengan legitimasi sistem secara keseluruhan..

Kata Kunci: Kesultanan DIY, *political settlements*, *Sultan Ground* (SG), lembaga perwakilan